BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan kesetaraan gender tidak bisa lepas dari krisis ekonomi Jepang. Krisis ekonomi Jepang pada dekade 1990 menyebabkan Jepang mengalami resesi ekonomi berkepanjangan dan terjadinya gelembung ekonomi yang berakhir pada tahun 1996. Kemudian krisis keuangan muncul kembali di tahun 1998 (Nanto, 2009) setelah itu Jepang terkena dampak dari krisis keuangan global pada tahun 2008-2009 (Kawai & Takagi, 2009, hal. 1). Sektor bisnis di Jepang bertahan dengan memperluas pasar dan menambah variasi bisnis untuk mempertahankan pekerjanya bukan semata-mata untuk keuntungan saja namun ternyata hal tersebut justru mempercepat gelembung ekonomi terjadi. Kondisi perekonomian Jepang semakin mengkhawatirkan karena keadaan demografi yang menurun, di mana Jepang memiliki generasi orang tua lebih banyak dibandingkan generasi produktif. Penurunan demografi Jepang juga mempengaruhi kualitas dan kuantitas tenaga kerja di Jepang yang juga semakin menurun (Abe N. , 2010).

Melihat kondisi tersebut, menurut laporan *Women-omics. Buy the Female Economy* yang ditulis oleh Matsui dkk bahwa kekuatan ekonomi perempuan yang terletak pada demografi, peningkatan partisipasi pekerja perempuan, budaya terkait pernikahan, jumlah aset. Kekuatan tersebut karena melihat jumlah pekerja laki-laki Jepang yang jumlahnya menunjukan sudah mendekati keterbatasan sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan bergantung pada

partisipasi perempuan. Hal yang dapat dilakukan Jepang untuk memperbaiki situasi ekonominya adalah dengan melibatkan dan memberikan kesempatan lebih besar pada perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Selain untuk mengurangi ketidaksetaraan gender yang sudah melekat di masyarakat, hal ini juga karena peran perempuan sangat memengaruhi tingkat kinerja perusahaan (Matsui, Suzuki, & Ushio, 1999, hal. 1).

Isu feminis di Jepang terlihat sangat kompleks karena bersinggungan dengan budaya tradisional Jepang itu sendiri. Menurut seorang Antropolog, Hara Hiroko menjelaskan bahwa perempuan yang sukses memperjuangkan hak yang dimilikinya dapat dijelaskan dalam sebuah pernyataan yaitu laki-laki di Jepang sangat memandang rendah perempuan dalam semua aspek tapi bukan berarti merendahkan peran perempuan. Karena peran perempuan tetap dianggap penting seperti halnya merawat anak, pekerjaan rumah tangga, mengatur finansial keluarga, dan juga sebagai penghubung antar personal dan anggota keluarga. Sehingga peran ini menjadi begitu penting dan laki-laki bergantung pada perempuan akan peran ini karena untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan suatu hubungan (Fu & Heine, 1995, hal. 124-125).

Beberapa perusahaan Jepang pernah menerapkan peraturan tradisional yang dimana calon pekerja laki-laki dipilih lebih banyak jumlahnya dibandingkan perempuan. Ketika perempuan memilih untuk menikah dan keluar dari perusahaan muncul permasalahan yang berlanjut yaitu akan mengalami masalah finansial ketika pada suatu saat nanti perempuan tersebut mengalami perceraian sehingga dapat dikatakan perempuan memiliki kesempatan yang terbatas (Francoeur & Noonan, 2004, hal. 638-639).

Karena terkait tradisi di Jepang, perempuan jadi harus memilih antara menikah atau berkarir. Masyarakat Jepang berasumsi bahwa perempuan yang memiliki tanggung jawab di pekerjaannya sementara harus meninggalkan pekerjaan untuk keluarganya. Walaupun perempuan di Jepang termasuk memiliki pendidikan yang tinggi di tingkat dunia akan tetapi mereka lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan menjaga anak-anaknya di rumah (Karan, 2005, hal. 195).

Hal yang membuat perempuan di tempatkan dalam situasi memilih antara menjadi ibu rumah tangga atau bekerja yang pada umumnya diasumsikan bahwa perempuan mengalami kesulitan ketika melahirkan anak pertama dan ingin melanjutkan kerja kembali kesulitannya yaitu mengasuh anaknya ketika perempuan tersebut bekerja karena tidak semua perusahaan memiliki fasilitas penitipan anak. Perlakuan yang biasanya di terima pekerja perempuan dalam situasi hamil adalah jabatannya diturunkan atau mengambil cuti melahirkan yang dianggap penyebab dalam pelecehan dalam masa kehamilan. Alasan tersebut biasanya yang membuat perempuan berhenti berkarir (*Still a struggle for working women*, 2016).

Diskriminasi perempuan yang terjadi di tempat bekerja seperti pembedaan kategori pekerjaan bahwa laki-laki lebih di tempatkan dalam pekerjaan utama sedangkan perempuan di tempatkan di pekerjaan seperti asisten. Hal tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan atau tempat bekerja di Jepang tidak memberikan kesempatan pada perempuan untuk menempatkan di posisi pekerjaan utama dengan alasan berdasarkan gender. Pemerintah Jepang merespon keadaan tersebut dengan membuat undang-undang untuk mengurangi kesenjangan tersebut pada tahun 1985 dalam rangka Jepang telah meratifikasi *United Nations*

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yaitu dengan melarang perusahaan-perusahaan melakukan tindakan diskriminasi (*Still a struggle for working women*, 2016).

Di tahun 1999 membentuk hukum yang bernama *The Basic Law* yaitu dengan melarang diskriminasi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti promosi jabatan dan perlakuan tidak adil terhadap situasi kehamilan, melahirkan, dan pernikahan. Undang-undang tersebut, menunjukkan kemajuan terhadap perempuan karena perempuan mulai di tempatkan di posisi utama. Hasil survei Kyodo News terhadap 28 perusahaan besar menunjukkan bahwa sekitar 80 persen dari kurang lebih 1.000 perempuan yang dipekerjakan oleh perusahaan meninggalkan perusahaan dengan berbagai alasan yang biasanya dikaitkan dengan ketidakmampuan perempuan menyeimbangkan antara pekerjaan dan rumah tangga (*Still a struggle for working women*, 2016).

Di bidang ekonomi dan politik Jepang sangat didominasi oleh laki-laki serta hanya 9.5 persen perempuan yang menempati posisi di *House of Representative* sehingga hal tersebut menjadi pertanyaan masyarakat Jepang akan posisi perempuan (Griffiths, 2016). Keadaan tersebut tidak menjadi prioritas kebijakan pemerintahan sebelumnya, karena pemerintah sebelumnya adalah memperbaiki infrastruktur pasca gempa di Jepang Timur, revitalisasi ekonomi, melawan perang energi nuklir (Prime Minister of Japan and His Cabinet, 2012). Namun, Tokyo baru saja mempunyai gubernur perempuan pertama di Tokyo, Yuriko Koike yang baru saja dipilih sebagai gubernur Tokyo pada tahun 2016 dan merupakan perempuan pertama yang menjadi gubernur sehingga Koike berjanji untuk mengejar kebijakan-kebijakan yang mempertimbangkan kondisi perempuan lebih baik lagi. Koike

merupakan anggota dari LDP. Dengan terpilihnya Koike menjadi gubernur perempuan pertama di Tokyo telah menjadi salah satu keberhasilan akan partisipasi politik dapat di pegang oleh perempuan (Griffiths, 2016).

Selain bidang ekonomi, partisipasi perempuan juga diperlukan dalam bidang politik namun perempuan di Jepang masih memiliki keterbatasan untuk terlibat aktif. Pada implementasi saat Meiji, kebijakan dan hukum tradisional dibuat, perempuan mempunyai peran sebagai pengurus anak dan dilarang memasuki ranah politik karena ranah tersebut hanya untuk laki-laki. Hiratsuka Raicho, Ichikawa Fusae dan Oku Mumeo, mereka bertiga adalah seorang jurnalis yang berhasil mengangkat isu peningkatan peran perempuan ke ranah publik. Salah satu anggota dari *New Woman Association*, Ichikawa Fusae percaya bahwa partisipasi perempuan dalam politik dapat menciptakan kesetaraan gender (Dales, 2009, hal. 14-16).

Salah satu pencapaian Jepang saat ini adalah program kebijakan fiskal dan moneter Shinzo Abe yang menjadi perhatian khusus salah satunya adalah kesempatan bekerja pada perempuan. Abe mencoba untuk memasuki era baru yaitu *Womenomics* sebagai salah satu kunci untuk mengamankan pertumbuhan pekerja perempuan. Melihat sejarah dari LDP itu sendiri sudah berkuasa selama 55 tahun dari 60 tahun terakhir. Dalam kepemimpinannya, LDP sering mengutaraan kata kesetaraan. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan, Haruko Arimura bahwa dulu LDP adalah pembela ibu rumah tangga setelah itu pekerja perempuan dan sekarang pemberdayaan perempuan ini dijadikan strategi kunci dalam program pertumbuhan Abenomics (Lewis, 2015). Penulis memiliki dugaan bahwa pencapaian Abe pada saat ini merupakan proses panjang dari dekade sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini akan mengkaji lebih dalam mengenai internalisasi gagasan norma kesetaraan gender di Jepang. Maka, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah *bagaimana proses internalisasi norma kesetaraan gender dalam periode 1990-2017 di Jepang?*.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses internalisasi gagasan norma kesetaraan gender ke Jepang
2. Untuk mengetahui apa yang membuat Jepang yang memiliki sistem patriarki dapat menerima gagasan norma kesetaraan gender.

1.4 Signifikansi

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melihat apa yang melatar belakangi Jepang menginternalisasi gagasan norma kesetaraan gender. Hal ini dianggap cukup penting untuk diteliti karena mengingat bahwa Jepang adalah negara yang menggunakan sistem patriarki yang mana laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior sehingga hal tersebut dapat dikatakan bertolak belakang dengan sistem yang telah digunakan oleh negara tersebut juga isu feminisme ini merupakan norma dari negara Barat. Penelitian ini akan menggunakan Teori Norma tahap kedua dan ketiga yang mana pada tahap kedua (*norm cascades*) akan menganalisa narasi-narasi internasional terkait norma kesetaraan gender. Dan tahap ketiga (*internalization*) untuk mengamati bagaimana proses internalisasi gagasan

norma kesetaraan gender di negara Jepang. Telah banyak penelitian yang berbicara mengenai bagaimana masyarakat Jepang memandang derajat perempuan dan hal-hal yang telah dilakukan oleh agen perubahan terkait isu feminisme di Jepang. Sehingga hal ini menarik untuk diteliti karena yang mana isu feminisme tersebut berasal dari negara Barat dan bertolak belakang dengan sistem patriarki yang dijalankan Jepang. Hal ini hampir serupa dengan Rwanda yang menempati posisi pertama pada tahun 2008 terkait jumlah perempuan terbanyak yang menempati kursi parlemen, padahal sebelumnya Rwanda mengalami masalah domestik yaitu diskriminasi terhadap suatu suku dan genosida tersebut suku Tutsi yang menjadi korbannya, namun sejak genosida tahun 1994 tersebut Rwanda berubah dan perempuan menjadi pemegang peranan penting di bidang formal (OECD, 2010).

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam studi Politik Pemerintahan Jepang. Dalam penelitian ini mencoba menganalisa terhadap internalisasi gagasan norma kesetaraan gender ke negara dengan sistem patriarki yaitu Jepang. Penelitian ini akan dibahas dari 1990-2017 karena pada tahun 1990 terjadi krisis asia yang berdampak pada Jepang juga. Dalam mengatasi krisis tersebut Jepang mulai memperhatikan peranan perempuan dan membentuk peraturan-peraturan terkait perempuan. Selain karena krisis ekonomi, pada periode tahun tersebut Jepang juga sudah menandatangani dan meratifikasi CEDAW. Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini terkait tentang tradisional perempuan di Jepang, budaya patriarki yang melekat pada Jepang yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender, kondisi perempuan atau perkembangan isu feminisme Jepang sebelum adanya kebijakan

Womenomics Abe. Selain itu juga membahas terkait narasi-narasi internasional tentang hak perempuan yang telah ditanda tangan dan ratifikasi oleh Jepang, agen-agen perubahan terkait isu feminisme di Jepang, narasi-narasi internasional yang telah disetujui oleh Jepang diinternalisasikan dalam suatu bentuk ke dalam Jepang.

1.6 Landasan Konsep

Teori Norma

Landasan konsep yang digunakan pada skripsi ini melihat tulisan dari Martha Finnemore and Kathryn Sikkink yang berjudul *International Norm Dynamics and Political Change* (Finnemore & Sikkink, 1998, hal. 887-917). Dalam tulisan tersebut penulis meninjau materi terkait norma dan fenomena ideasional dengan tiga argumen. Pertama, ideasional "perubahan" yang terjadi beberapa tahun belakangan ini sebenarnya adalah "perubahan kembali" pada peraturan tradisional. Akan tetapi dengan kembalinya ke masa tersebut tidak membuat kita kembali ke tempat dimana kita memulai. Kedua, penulis menuliskan beberapa hal tentang tiga aspek dari norma itu sendiri yaitu kemunculannya, mekanisme penyebaran yang digunakan, dan kondisi dimana norma akan tersebar di dunia perpolitikan. Secara spesifik penulis berargumen bahwa perkembangan norma layaknya seperti siklus hidup, lalu pemikiran perilaku yang berbeda mendominasi di bagian siklus hidup yang berbeda. Ketiga, dituliskan bahwa terdapat kecenderungan tertentu untuk membantah norma rasional atau *rational choice* yang dirasa tidak membantu banyak dalam menjelaskan dari kebanyakan proses-proses politik penting yang dilihat dari riset empiris yang dikenal dengan konstruksi struktur sosial yaitu

dimana strategi aktor rasional untuk merekonfigurasi ulang pilihan, identitas-identitas, atau konteks sosial.

Karena norma melibatkan standar dari perilaku "kesesuaian" atau "kelayakan", kesesuaian tersebut diambil berdasarkan penilaian dari suatu komunitas atau masyarakat yang ada. Mengenai penjelaskan tentang *norm life cyle* yang dibagi menjadi tiga tahap. Norma tersebut menjadi penting untuk dipelajari oleh para ilmuwan karena norma tersebut dapat membantu para ilmuwan untuk menganalisa pengelolaan sosial dan logika yang perilakunya dimasukan di tahap-tahap *norm life cycle*. Penulis percaya bahwa aktor yang terlibat, motif kepentingan, dan mekanisme atau pengaruh akan saling berbeda di setiap tahapnya.

Tahap pertama yaitu *origins* atau *emergence of norms. Norm emergence,* norma ini dibawa oleh *norm entrepreneurs*. Yang dilakukan dalam *norm entrepreneurs* yaitu membingkai sebuah isu dengan tujuan agar isu tersebut bisa terkenal ke masyarakat luas. Selain itu, tujuan norma tersebut yakni para agen yang memiliki tingkat gagasan yang sudah kuat sehingga dapat lebih leluasa membentuk apa yang dibutuhkan oleh komunitas tersebut. Menurut para ahli norma sosial dan politik, sulit untuk menjelaskan tujuan *norm entrepreneurs* tanpa melihat empati, ideasional komitmen, altruisme. Pada tahap ini, norma ini mencoba untuk memperlihatkan dan memberanikan diri untuk membentuk suatu norma yang baru.

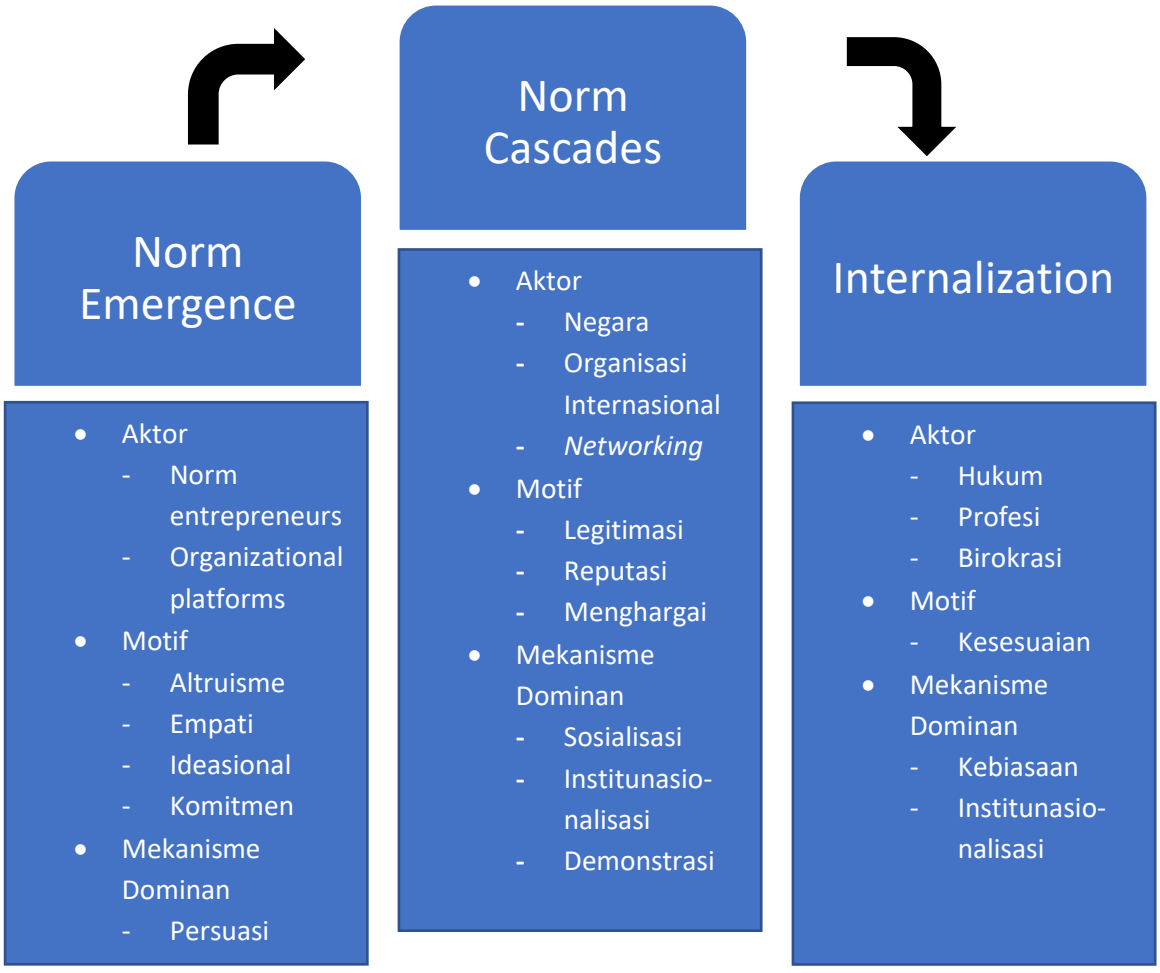
Tahap kedua yaitu *norm cascades*. Posisi dari norma ini yaitu mensosialisasikan suatu norma baru ke negara atau wilayah lainnya agar norma tersebut diikuti. Pengaruh internasional dan transnasional dianggap menjadi lebih penting daripada politik dalam negeri, hal ini terjadi karena adanya pengaruh yang

ada baik di internasional maupun regional, tetapi pengaruh tersebut bersifat pasif. Sebenarnya, mekanisme utama untuk mempromosikan suatu norma adalah dengan mengangkat norma tersebut ke level internasional untuk dipromosikan agar dapat mendorong yang tadinya tidak mendukung norma tersebut berubah menjadi mendukung norma tersebut. Dan menurut politik internasional, sosialisasi melibatkan pujian atau kecaman diplomatik, baik bilateral maupun multilateral, yang diperkuat oleh sanksi dan insentif material, namun perlu diketahui bahwa negara bukanlah satu-satunya agen sosialisasi. Sosialiasi menjadi mekanisme yang dominan untuk menjatuhkan dan mendukung suatu norma agar orang-orang menjadi mengikutinya. Yang menjadi pertimbangan norma tersebut ingin dijatuhkan atau didukung yaitu karena terkait identitas mereka sebagai masyarakat internasional yang merepresentasikan perilaku negara tersebut yang berasal dari konteks institusional budaya dimana negara bertindak. Pada norma ini juga, norma lebih mudah diterima secara luar sehingga aktor lebih mudah untuk beraksi di internal.

Namun dalam tahap ini, perlu diketahui bahwa karena populasi norma dalam hal ini adalah negara yang berbeda-beda sehingga akan membawa ke alur dimana pihak-pihak merasa tekanan yang bersumber dari internasional itu sendiri sehingga mau tidak mau norma tersebut seakan-akan sebagai kewajiban untuk diikuti. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan legitimasi internasional serta harga diri.

Tahap ketiga yaitu *Internalization*. Saat *norm cascades* berada di posisi tertinggi, norma lebih mudah diterima secara luas sehingga aktor lebih mudah untuk diinternalisasi. Peran seorang profesional dianggap sangat bermain dalam keadaan ini yaitu untuk memperkuat internalisasi norma tersebut. Peran tersebut yaitu

dengan menginternalisasinya nilai-nilai tersebut ke antar anggota-anggota atau individu-individu lainnya. Dalam tulisan tersebut penulis memberi contoh seperti misalnya tentara dibuat untuk mengorbankan hidupnya untuk mencapai pemenuhan kebutuhan tertentu berdasarkan tujuan strategi yang dibuat. Dalam tulisan tersebut juga menganggap bahwa organisasi internasional berperan penting dalam perkembangan norma tersebut yang dapat dilihat dari pembuatan keputusan. Untuk itu, kebiasaan profesional atau aktor memiliki peranan yang cukup penting untuk menginternalisasi suatu norma.



Gambar 1.1. : Skema Teori Norma *(Finnemore & Sikkink, 1998, hal. 887-917).*

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan menganalisa penelitian ini menggunakan Teori Norma tahap kedua yaitu *norm cascades* dan tahap ketiga yaitu *internalization* sebagai variabel dari penelitian ini. *Norm cascades* akan digunakan penulis dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi di Jepang terkait pengaruh narasi-narasi internasional terhadap norma kesetaraan. Dan *internalization* akan digunakan dalam mengamati bagaimana proses internalisasi norma kesetaraan gender di negara tersebut karena seperti yang telah dituliskan di latar belakang bahwa tradisonal Jepang itu sendiri tidak membolehkan perempuan untuk masuk ke ranah politik, hanya diperbolehkan mengurus anak sedangkan di pemerintahan Shinzo Abe menjadi penggiat pemberdayaan perempuan dengan berusaha untuk memberikan ruang gerak untuk perempuan dalam bidang perekonomian. Sehingga seperti yang telah dipaparkan di latar belakang bahwa isu feminisme ini sangat kompleks di Jepang karena bersinggungan dengan zaman tradisional Jepang.

Penulis tidak menggunakan *norm emergence* dalam menganalisa penelitian karena dalam penelitian ini penulis tidak melakukan analisa terkait bagaimana norma kesetaraan gender muncul pertama kali di dunia atau siapa yang pertama kali mencetuskan norma kesetaraan gender. Namun penelitian ini dimulai dari gagasan norma kesetaraan gender yang diadopsi oleh internasional yang kemudian disebar ke negara-negara lainnya lalu setiap negara-negara anggota yang menyetujui gagasan tersebut yaitu dengan menanda tangani dan meratifikasi wajib mengimplementasikan di negaranya masing-masing serta memberikan laporan perkembangannya di pertemuan yang ditentukan.

Penulis akan menganalisa dengan melihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah hukum internasional terkait perempuan yang telah ditanda tangan dan ratifikasi oleh

Jepang. Sisi kedua yaitu peran negara dan individu yang mana dalam hal ini bisa seperti agen-agen atau individu yang menginternalisasi norma kesetaraan gender dan membawa perubahan terkait isu feminisme di Jepang.

1.7 Tinjauan Pustaka

Mengenai kondisi ketimpangan gender perempuan di Jepang buku dari Naoko Takemaru yang berjudul "*Women in the Language and Society of Japan: The Linguistic Roots of Bias* (Takemaru, 1964, hal. 3-11), mulai pada tahun 1970, para ilmuwan feminisme melakukan riset bahwa perempuan dewasa (*Onna*) pada khususnya memiliki konotasi negatif dibandingkan laki-laki dewasa (*Otokko*). Konotasi tersebut seperti "*Onna san nin yoreba kashimashii*" yang berarti bahwa tiga perempuan yang bersama, mereka membuat kegaduhan. "*onna no asajie*" artinya perempuan yang pola pikirnya buruk/dangkal. "*Medoki*" artinya masanya perempuan, masa yang tidak beruntung. "*Odoki*" artinya masanya laki-laki, masa yang beruntung. Melihat dari kalimat-kalimat tersebut melihatkan bahwa perempuan dilihat sebagai makhluk yang rendah. Sistem Patriarki ini mulai menyebar ditandai dengan adanya gagasan dari kepercayaan agama yang pada saat itu adalah Budhis dan Shinto, "laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior" (*Danson jobi*). Gagasan tersebut terserap ke semua kalangan kelas sosial saat Era Meiji (1868-1912) ketika Japanese Civil Code 1898 dilegitimasi tentang sistem keluarga dan rumah tangga (*ie system*) dimana sistem tersebut berasal dari *Samurai* (Prajurit Jepang) di Era Kamakura (1185-1333) dan Era Edo (1603-1867). Dan mulai dari hal tersebut, sistem patriarki ini terlihat dalam mengatur wewenangan anggota keluarga dimana anak laki-laki tertua menjadi kepala

keluarga, lalu untuk menjaga keturunannya anak tersebut selain mendapat warisan properti juga mendapat wewenangan absolut atas anggota keluarga. Peristiwa ini menggambarkan ketidaksetaraan gender yang ekstrim karena mengunggulkan salah satu gender saja yaitu laki-laki.

Hal ini didukung oleh tulisan dalam buku "*Feminism and Migration: Cross-Cultural Engagements*" (Bonifacio, 2012, hal. 92-93) mengatakan bahwa stereotipe pada perempuan di Jepang masih jauh dari rasa aman karena melihat peristiwa ibu tunggal di Jepang yang dianggap gagal oleh masyarakat Jepang dalam membina pernikahannya dan mengalami masalah finansial. Buku tersebut mencoba membandingkan dengan Australia yang justru lingkungannya bebas dari sistem patriarki dan masyarakat Jepang dirasa lebih kaku dalam isu gender dibandingkan Australia.

Yang menjadi masalah dalam sistem patriarki di Jepang adalah ketidakpuasaan terhadap perempuan. Walaupun semakin banyak perempuan yang menerima keadaan bahwa peran perempuan sebagai ibu rumah tangga akan tetapi yang menolak hal tersebut meningkat sehingga tidak bisa kita asumsikan bahwa semua perempuan setuju akan hal tersebut. 'Keharusan' seorang perempuan untuk menjadi ibu rumah tangga menjadi bagian dari karakteristik sistem patriarki karena melihat seorang ibu memiliki waktu penuh untuk mengasuh anak dipandang sebagai sebuah kasih sayang. Sistem patriarki ini jika kita komparasikan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, sepertinya sebab dari sistem patriarki ini bukanlah agama. (Sechiyama, 2013, hal. 133).

Dalam tulisan "*Redefining the "Women's Movement" in Modern Japan*" oleh Allison Elizabeth Kennington menuliskan bahwa *The New Woman Association* merupakan pencetus pertama terhadap perempuan untuk mendapatkan hak pilih, peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa Asosiasi tersebut peduli akan isu ini dan berusaha untuk mengeleminasikan bentuk-bentuk yang seharusnya bisa didapatkan oleh perempuan. Dalam hal ini, Asosiasi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai gerakan perempuan pertama di Jepang yang membahas isu pengertian politik Barat (Kennington, 2013, hal. 4).

Pada tulisan yang berjudul "*The Quiet Revolution: Japanese Women Working Around The Law*" (Miller, 2003, hal. 163-164) bahwa EEOL (*Equal Employment Opportunity Law*) 1985 dibuat dalam merespon peristiwa diskriminasi terhadap perempuan di Jepang namun EEOL 1985 menuai respon akan ketidakpuasaan karena dianggap belum mampu untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut sehingga perlu adanya evaluasi. Pada tahun 1997, EEOL di revisi sehingga dirasa dapat mendatangkan peluang kepada perempuan dalam kesempatan bekerja.

Dalam tulisan "*Women in the Workplace: Sexual Discrimination in Japan*" oleh Kelly Barret (Barrett, 2004, hal. 1) disebutkan bahwa untuk merespon kritik terkait budaya ketidaksetaraan gender di tempat kerja yang telah terjadi sejak Era Meiji, pemerintah meloloskan EEOL 1997 yang dibuat untuk mengurangi diskriminasi terhadap gender di tempat kerja seperti dalam penyeleksian, posisi, tugas dari pekerjaan pekerja.

Melihat hambatan dan tantangan yang terjadi pada perempuan, dalam buku "*Current Perspectives on Asian Women in Leadership: A Cross-Cultural Analysis*"

mengatakan bahwa dalam kebijakan pemerintah, pemerintahan Shinzo Abe mendukung partisipasi perempuan untuk menjadi pemimpin di ketenagakerjaan secara agresif. Tahun 2013, Abe mengupayakan pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan pemimpin perempuan sebanyak 30% pada tahun 2020. Walaupun dalam jangka panjang nanti jumlah pemimpin dalam tenaga kerja perempuan diprediksikan akan meningkat tetapi jumlahnya akan tetap lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara lainnya (Cho, Sun, Ghosh, & McLean, 2017, hal. 73-74).

Yang menjadi pertimbangan Jepang untuk melibatkan perempuan dalam bidang pekerjaan termasuk ekonomi dan politik karena pekerja di Jepang terlihat tidak stabil. Perubahan jabatan perempuan di Jepang menjadi ancaman yang serius sehingga ide feminis diperlukan dalam hal ini. EEOL merupakan jaminan untuk perempuan Jepang agar mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama (Aronsson, 2015, hal. 1).

Representasi perempuan di politik sudah meningkat hal ini dilihat dari presentase tahun 2012 yang mana tahun tersebut tahun diperkenalkannya womenomics hingga 2014 yang meningkat hingga 1.45%. Peningkatan tersebut masih tergolong rendah. Penyebab peningkatan yang rendah itu dapat terjadi karena masih adanya hambatan seperti pernikahan, seorang ibu harus memberikan waktu penuh untuk merawat anak, seorang anak hingga umur 3 tahun perlu untuk diasuh di rumah (Hasunuma, 2017, hal. 21-22).

Dalam penelitian skripsi yang berjudul "*Women and Work in Contemporary Japan: Deconstructing The "Crisis" of the Gender Order*" oleh Lillian Mai,

menjelaskan bahwa di Jepang memiliki sifat maskulin yang mempengaruhi seperti istilah *Sarariiman* (laki-laki yang bergaji) dan *Daikokubashira* (laki-laki yang bergaji sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga) (Mai, 2007, hal. 30). Norma hegemoni maskulin mulai masuk saat Era Meiji dan mempengaruhi tingkat derajat laki-laki di Jepang yang dibuktikan dengan adanya dua istilah tersebut. Istilah tersebut kemudia dianggap berhasil dan dipercaya masyarakat sehingga munculah keresahan isu gender karena menghambat perkembangan pihak lainnya (Mai, 2007, hal. 47-48). Perempuan di Jepang biasanya akan keluar dari kantor ketika akan menikah dan akan kembali bekerja setelah anak mereka sudah di umur-umur anak sekolah (Mai, 2007, hal. 53). Keresahaan akan ketidaksetaraan gender dan terutama pada isu populasi orang tua di Jepang pernah menjadi fokus Perdana Menteri Hashimoto Ryutaro, sehingga Hashimoto ingin mereformasi keadaan tersebut sesuai dengan laporan "Vision of Gender Equality: Creating New Values for the 21st Century" tahun 1996, lalu diubah menjadi "*The National Plan of Action for Promotion of a Gender-Equal Society by the Year 2000*" di bawah Dewan Kesetaraan Gender. Selain adanya EEOL, Jepang juga memiliki *Child Care and Family Care Leave Law* (CCFCLL) tahun 1995, Part-time Work Law (PTWL) tahun 1993 (Mai, 2007, hal. 67). Dengan adanya berbagai hukum untuk melindungi hak perempuan di Jepang menandakan bahwa hak perempuan sulit diakses oleh perempuan Jepang dengan melihat peristiwa masuknya norma hegemoni maskulin yang menandakan mengapa perempuan lebih sulit untuk berkegiatan seperti bekerja dibanding laki-laki karena dominasi dari dua istilah tersebut yaitu *Sarariiman* dan *Daikokubashira.*

Melihat dari penelitian-penelitian yang sudah ada, penulis ingin mencoba membahas terkait norma kesetaraan gender ini terinternalisasi di Jepang dalam periode 1990-2017 dan penelitian ini belum ada yang membahas sebelumnya.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang mana untuk memahami serta menafsirkan dalam sosial seperti sebuah peristiwa interaksi dan perilaku yang sedang diamati. Dalam penelitian ini membantu penulis untuk memahami peristiwa masuknya gagasan noma kesetaraan gender di internasional dan Jepang. Data-data yang diperoleh sebagai sumber dapat berupa kata-kata dan gambar, tidak berupa angka-angka sehingga lebih bersifat deskriptif atau naratif, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya data berupa angka atau tabel namun biasanya tetap bersifat deskriptif. Menurut John W. Creswell bahwa penelitian dalam kualitatif memiliki struktur kerangka yang fleksibel. Dan juga menurut Norman K. Denzim dan Yvonna S. Lincoln pengumpulan data kualitatif berupa empiris yaitu seperti studi kasus, pengalaman personal, sejarah, observasi, wawancara, cerita kehidupan (Bakry, 2016, hal. 14-20).

1.8.1 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah gagasan norma kesetaraan gender yang dapat masuk ke negara sistem patriarki yaitu Jepang, pandangan dan perilaku masyarakat Jepang akan sistem patriarki, hal-hal yang terjadi pada perempuan terkait hak sebagai pekerja, berkeluarga, ketidaksetaraan gender yang terjadi di Jepang serta efek dan respon pemerintah maupun internasional terhadap

ketidaksetaraan tersebut, narasi-narasi internasional tentang hak perempuan yang telah ditanda tangan dan ratifikasi oleh Jepang, agen-agen perubahan terkait isu feminisme di Jepang karena hal tersebut dirasa dapat membantu penulis untuk mengetahui proses internalisasi isu ini ke Jepang serta melihat bagaimana perkembangan isu tersebut di Jepang sehingga gagasan norma kesetaraan gender bisa masuk ke Jepang serta adanya istilah *Womenomics* di Jepang.

1.8.2 Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder tersebut merupakan data yang diperoleh dari orang kedua, data tersebut dapat berupa seperti buku dan data dokumen yang bersumber dari internet seperti website, literatur, laporan, majalah, buletin, jurnal yang bersumber dari internet seperti tandfonline.com, proquest.com, dan lainnya. Data ini juga bisa berupa dokumenter karena sumber data tersebut diperoleh dari grafik, catatan resmi, dokumen, peta. Untuk mempertimbangkan data yang diperoleh adalah data yang baik, kategori data yang baik yaitu (Waluya, 2007, hal. 79) :

1. Objektif, sesuai atau apa adanya dengan aslinya
2. Relevan, sesuai dengan isu yang ingin diselesaikan atau analisa
3. Populasi dan sampel dapat merepresentasikan data yang ingin dijelaskan
4. Terbaru, pastikan data yang diperoleh masih berlaku

1.8.3 Proses Penelitian

Dalam mengawali penelitian dengan metode kualitatif ini, tahap pertama yaitu konseptualisasi masalah yaitu dengan mempertanyakan masalah tersebut

dengan pertanyaan dasar sesuai dengan yang terjadi. Dalam tahap konseptualisasi ini dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan pada tiap tahap-tahap berikutnya. Tahap kedua, menuliskan pertanyaan penelitian dan memiliki hipotesa awal dalam penelitian ini sebagai jawaban sementara sebelum diteliti. Setelah itu juga menuliskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Tahap ketiga, menentukan teori atau kerangka konsep untuk menganalisa permasalahan tersebut. Hal tersebut bertujuan agar menghasilkan analisa yang teoritis. Jika sudah mengetahui akan menggunakan teori yang mana maka peneliti akan lebih mudah merumuskan data-data yang seperti apa yang diperlukan dalam penelitian ini. Tahap keempat, telah mengetahui tempat dimana untuk mengambil data-data keperluan penelitian dan strategi dalampengumpulannya. Tahap kelima, merumuskan bagaimana agar data tersebut diperoleh. Misalnya dengan melakukan wawancara, menyebarkan kuisioner, dan lain-lain. Tahap keenam, pengumpulan data. Yang dimaksud dalam tahap ini adalah tinjauan pustaka untuk memastikan data yang digunakan valid serta untuk melihat penelitian yang sudah dilakukan. Tahap ketujuh, pengolahan data. Data yang telah diperoleh mulai diolah dengan dianalisa. Tahap kedelapan, analisa dan interpretasi hasil penelitian. Setelah itu hasil penelitian tersebut ditulis dengan menjawab juga pertanyaan penelitian yang telah dibuat di tahap sebelumnya (Gulo, 2000, hal. 27-30).